

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek OneHealth selama 5 minggu yaitu pada tanggal 07 April hingga 10 Mei 2025 maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Selama kegiatan PKPA di apotek OneHealth, calon Apoteker dibekali dengan wawasan, pengetahuan, keterampilan serta pengalaman dalam pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai secara nyata di apotek di mulai dari kegiatan perencanaan pengadaan pemilihan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, dan pelaporan sediaan farmasi.
2. Selama kegiatan PKPA di apotek OneHealth, calon Apoteker dapat mengetahui tugas serta tanggungjawab seorang Apoteker yang dibutuhkan dalam kegiatan kefarmasian di apotek dan mampu secara aktif memberikan pelayanan kefarmasian pada pasien (Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan memberikan pelayanan swamedikasi).
3. Selama kegiatan PKPA di apotek OneHealth, calon Apoteker dapat mengenal serta melaksanakan tugas, tanggung jawab, kewajiban secara profesional, disiplin, berwawasan luas dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit, dan Antusias (PEKA) dalam melakukan pekerjaan kefarmasian. Selain itu, calon Apoteker diharapkan mampu mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh pada bangku perkuliahan dalam keadaan sebenarnya di lapangan serta mampu menumbuhkan rasa percaya diri hal tersebut juga membantu

peningkatan soft skills untuk meningkatkan kreatifitas dalam memberikan pilihan obat dan dapat melayani pasien dengan baik dan benar.

5.2 Saran

Setelah melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek OneHealth, maka disarankan:

1. Calon Apoteker dapat membekali diri sebelum melaksanakan PKPA di apotek mengenai perundang-undangan serta regulasi terbaru baik dalam hal perijinan maupun mengenai sistem pelaporan di apotek.
2. Calon Apoteker dapat membuat dan menuliskan Pelayanan Informasi Obat (PIO) dalam suatu lembar/formulir khusus saat melayani pasien.
3. Calon Apoteker dapat berperan lebih aktif dan lebih cepat tanggap dalam menjalankan PKPA sehingga memperoleh pengetahuan dan pengalaman yang lebih serta mencapai kompetensi yang diinginkan.
4. Pemberian KIE pada pasien mengenai penggunaan obat yang tepat dapat ditingkatkan supaya pasien memperoleh informasi dan edukasi yang tepat sehingga efek terapi yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan serta dapat meningkatkan kemampuan ketrampilan dalam menyampaikan informasi kepada pasien dengan tujuan membangun rasa percaya pasien terhadap Apoteker.

DAFTAR PUSTAKA

- American Society of Health System Pharmacists, 2011, AHFS Drug Information, United States of America.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, 2019, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obat Tertentu yang sering disalahgunakan, Jakarta.
- Brayfield, A. 2014, Martindale The Complete Drug Reference, 38th ed., The Pharmaceutical Press, London.
- BNF, 2022, British National Formulary 83th Edition, BMJ Group, London.
- BNF, 2023, British National Formulary 85th Edition, BMJ Group, London.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2023, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Focsa, A., Sava, A., Ababeri, A., and Apotrosoaei, M., 2021, Drug Interactions in Gastrointestinal Disorder Therapy, Pharmaceutical Practice.
- ISO, 2021, Informasi Spesialite Obat Indonesia Volume 53, ISFI, Jakarta.
- Katzung, B. G., 2018, Basic & Clinical Pharamcology 14th ed., McGraw Hill Companies, California.
- Kementerian Kesehatan RI, 2009, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan RI, 2015. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta

- Kementerian Kesehatan RI, 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan RI, 2017, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan RI, 2019, Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan RI, 2018, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 26 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan RI, 2021, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan RI, 2021, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan RI, 2021, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan, Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Lacy, F.C., Armstrong, L.L., Goldman, P.M. and Lance, L.L. 2018, Drug Information Handbook, 26th Ed., American Pharmacists Association, North America.

Lemke, T.L. and Williams, D.A., 2013, Foye's Principles of Medicinal Chemistry Seventh Edition, Lippincott Williams and Wilkins. Baltimore.

Medscape, 2021, Medscape: Drug & Diseases, Diakses pada Mei 2024, <http://reference.medscape.com>.

MIMS, 2024, Drug Information, Diakses pada Mei 2024, <https://www.mims.com/indonesia>.